BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang evektivitas pengelolaan pendidikan (Mulyasa, 2002). Hal tersebut lebih terasa lagi dalam mengimplementasikan MBS (Manajemne Berbasis Sekolah) yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat atau pemerintah.

Menyelenggarakan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terlupakan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen komponen lain. Dengan kata lain semua kegiatan di sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari (Mulyasa, 2002). Oleh karena itu, dana-dana tersebut harus dikelola sebaik mungkin agar dapat di manfaatkan secara baik dan optimal untuk menunjang tercapainya tujuan Pendidikan.

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga pendidikan saat ini membutuhkan perhatian khusus. Bukan hanaya dari pihak pemerintah saja yang harus mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan dilembaga pendidikan. Namun para orang tua, masyarakat juga dituntut aktif untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan sekolah.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukan bagi kepentingan kependidikan, (2) Orang tua atau peserta didik, (3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat (Mulyasa, 2002). Sesuai dengan UU sistem

pendidikan Nasional pada tahun 2003 bab XIII mengenai pendanaan pendidikan, bagian ketiga mengenai pengelolaan dana pendidikan pasal 28 ayat (1), berbunyi bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadailan, efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan (UU, 2003). Artinya segala dana yang masuk dan keluar baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat harus bersifat transparan dan akuntabel. Dengan kedua prinsip tersebut dimaksudkan bahwa masyarakat mengetahui dana yang keluar dan masuk digunakan kemana untuk apa saja. Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam program RKAM.

Selama ini sekolah hanya memiliki laporan laporan pertanggung jawaban sebagai bentuk transparansi keuangan sekolah. Diharapkan sekolah memiliki laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan sekolah yang terdiri atas neraca, laporan surplus, deposit, laporan arus kas serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa (Bastian, 2007).

Fakta yang terjadi dilapangan mengenai pola pembiayaan pendidikan setelah berlakunya otonomi daerah salah satunya ialah dalam pembiayaan pendidikan, dimana masih rendahnya akuntabilitas publik baik di level pusat maupun daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 3.600 orang tua siswa dari 720 sekolah di sejumlah tanah air, hasilnya adalah 71,6% orang tua tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65% tidak melihat papan pengumuman sekolah, tentang penggunaan BOS. Selain itu, 89,58% orang tua tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS dan memberikan saran kepala sekolah (Tuzzahra, 2022).

Pertanggungjawaban keuangan yang transparansi dan akuntabel diharapkan dapat memotivasi orang tua murid untuk ikut berperan dalam menanggung dana pendidikan. Hasil riset yang dilakukan telah menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Sekolah tidak pernah menyampaikan jumlah subsidi yang diterima dari pemerintah dan sekolah tidak pernah memberikan laporan pengelolaaan dana kepada masyarakat secara transparan.

Dalam sebuah penelitian dihasilkan bahwa pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana terhadap partisipasi masyarakat sebesar 89,8% (Yohanes, 2018). Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab akan mendapat kepercayaan dari warga sekolah dan orang tua murid.

Sebagian orang tua murid berpendapat bahwa sarana dan prasarana sekolah adalah tanggungjawab pemerintah dalam hal ini di sekolah. Pendapat yang keliru dalam menunjukan sikap yang kurang peduli dari orang tua murid terhadap pendidikan, dalam penyelenggara pendidikan partisipasi orang tua murid sangat diharapkan oleh pihak sekolah. Partisipasi yang diberikan orang tua murid kepada satuan pendidikan dapat menyumbangkan sejumlah dana untuk penyelenggaraan pendidikan dan partisispasi dalam pengawasan pengelolaan dana dari orang tua murid tersebut. Dalam hal ini, tuntutan akuntabilitas mengharuskan penekanannya pada pertangungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertical.

Selama ini, pengelolaan pendidikan dibanyak sekolah terkesan tertutup bagi pihak luar. Masyarakat orang tua murid seolah-olah tidak banyak mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan disekolah, tidak dilibatkan dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kinerja sekolah dan sebagainya. Pengelolaan yang tidak dianggap transparan dan akuntabel berdampak negatif bagi perkembangan sekolah, karena orang tua murid akan meragukan sumbangan yang mereka berikan akan benar benar dimanfaatkan bagi kepentingan penyelanggaraan pendidikan atau akan terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan.

Partisispasi sangat berguna bagi sekolah didalam memvalidasi premis dari mana sebuah program berasal, maka dari itu akan berkontribusi terhadap efektifitas program orang tua siswa. Krena melihat fakta di lapangan bahwa terdapat masalah tunggakan siswa yang terjadi pada setiap bulannya. Hal tersebut menjadi dasar peneliti ingin melakukan penelitian dan pengujian tentang "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan RKAM Terhadap Partisipasi

Orang Tua dalam Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Bandung".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- 1. Apakah ada pengaruh akuntabilitas pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Bandung?
- 2. Apakah ada pengaruh transparansi pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Bandung?
- 3. Apakah ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Bandung?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirangkumkan tujuan dari penelitian ini yang nantinya dapat dicapai setelah penelitian berakhir. Tujuan dari penelitian yang diharapkan peneliti adalah untuk:

- 1. Mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Bandung.
- Mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Bandung.
- Mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis juga praktis. Adapun kedua manfaat tersebut dijabarkan dalam penjelasan dibawah ini:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan substansi ilmu pengetahuan yang relevan dalam memperkaya wawasan konsep dalam bidang manajemen pendidikan. Selain itu penulis berharap hasil penelitian ini dapat menguatkan terhadap teori-teori yang sudah ada sebelumnya dan bisa menjadi referensi untuk penulisan karya ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi diri sekolah untuk lebih meningkatkan pengawasan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).
- b. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang penelitian sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Bandung.
- c. Bagi pembaca hasil penelitian ini, diharapkan sebagai masukan untuk dapat melakukan penelitian lebih akurat dengan populasi dan sampel yang berbeda, sehingga dapat memuatkan kesimpulan.

E. Batasan Penelitian

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah:

- 1. Akuntabilitas dan transparansi yang dimaksud dalam penelitan ini dibatasi pada akuntabilitas dan transparansi pelaporan dan pertanggung jawaban dana madrasah dalam pengelolaan RKAM di MAN Se-Kabupaten Bandung.
- 2. Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk perilaku orang tua dalam hubungan timbal balik yang mempengaruhisikap dan respon orang tua siswa di MAN Se-Kabupaten Bandung.

F. Kerangka Berfikir

1. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggungjawabkan atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawab. Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masingmasing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumbersumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya (Julantika, 2017). Akuntabilitas menurut *Lessinger*, adalah kajian hubungan antara apa yang sudah dilakukan sekolah dengan dana yang digunakan dengan hasil belajar yang diperoleh. Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir

semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Pengertian akuntabilitas dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas pertanggung jawaban mereka dan dengan cara mengimput data anggaran yang telah diberikan dan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sumber pendanaan sekolah sebagian besar dari pihak luar yaitu dari pemerintah yang bersumber dari dana APBN/PBD berupa dana bantuan operasional (BOS) dan dari pihak luar lainnya terutama orang tua siswa berupa sumbangan pendidikan (SPP). Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan (Saputri, 2020).

a. Dimensi Akuntabilitas

- 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
- 2. Akuntabilitas Manajerial
- 3. Akuntabilitas Program
- 4. Akuntabilitas Kebijakan

b. Indikator Akuntabilitas

Menurut (Mahmudi, 2011) indikator-indikator Akuntabilitas diantaranya:

- 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
- a) Kepatuhan terhadap hukum

- b) Penghindaran korupsi dan kolusi
- 2. Akuntabilitas Manajerial
- a) Peran yang jelas
- b) Harapan kinerja yang jelas
- c) Pelaporan kribel
- 3. Akuntabilitas Program
- a) Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
- b) Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat
- 4. Akuntabilitas Kebijakan
- a) Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil
- b) Mempertimbangkan dampak di masa depan

c. Macam-Macam Akuntabilitas

1. Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ke MPR

2. Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2. Transparansi

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kaliborasi,kerjasama,dan pengambilan keputusan kolektif. Transparansi menurut Lodge, menyatakan bahwa "transparency is associated with prescribed standards of making regulatory activities access-and assess-able. Sedangkan Klimes mendefinisikan transparency is readly understandable, clear, without guile, candid". Adapun menurut Abidin, transparansi juga dapat juga diarikan bahwa "

informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bias diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang dipahami". Hal senada dikemukakan Hermawan yang menyatakan bahwa" transparansi berkaitan dengan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun". Hertanto menyatakan bahwa transparansi yaitu publikasi laporan keuangan (Setiyani, 2014).

Definisi transparansi adalah kondisi dimana aturan dan alasan di balik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas,jelas dan terbuka (Bastian, 2006). Transparansi berasal dari kata transparan yang memiliki arti:tembus cahaya,tembus pandang,bening(bila penggunanya pada objek kaca) yang penggunaannya sering terhadap suatu benda/objek yang berbentuk tipis atau tampak bening pada penglihatan.

a. Indikator Transparansi

Menurut (Kristianten, 2006) indikator-indikator dari transparansi adalah:

- 1. Kesediaan dan Aksebilitas dokumen
- 2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi
- 3. Keterbukaan Proses

Transparansi pemerintahan dengan indikator yang disebutkan di atas memungkinkan tumbuhnya peran serta masyarakat. Dengan demikian pemerintahan yang transparan perlu dilengkapi dengan tersedianya akses masyarakat dalam berpartisipasi.

Informasi yang diberikan oleh masyarakat atau orang tua siswa mengenai prosedur, waktu, dan biaya merupakan transparansi dalam bentuk publik. Sebagaimana dijelaskan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, persyaratan prosedur, waktu, dan biaya harus dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diketahui oleh masyarakat atau orang tua siswa. Informasi pelayanan publik tersebut disalurkan melalui media cetak, surat panggilan, papan pengumuman, dsb (Labolo, 2003).

3. Partisipasi

Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh *Fasli Djalal dan Dedi Supriadi*, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

a. Indikator Partisipasi

Menurut Oakley dalam (Ismail, 2019) indikator-indikator partisipasi diantaranya:

- 1. Kontribusi Pemikiran, yaitu ikut berpartisipasi buah pikiran, pendapat/ ide, saran, pertimbangan, nasehat dukungan moril dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau dalam pengambilan suatu keputusan dan atau dalam penyelenggaraan pengembangan pembelajaran
- 2. Kontribusi Tenaga, yaitu ikut berpartisipasi dalam membantu tenaga kependidikan, tenaga ahli, keterampilan dalam membantu KBM, ikut serta dalam program pendidikan memperbaiki sarana-prasarana dll.

b. Macam-Macam Partisipasi

- Partisipasi langsung, Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- 2. Partisipasi tidak langsung, Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Pendapatlain disampaikan oleh Subandiyah yang menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga yaitu partisipasi dalam pengambilan kepitusan, partisipasi dalam proses perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. (Ismail, 2019).

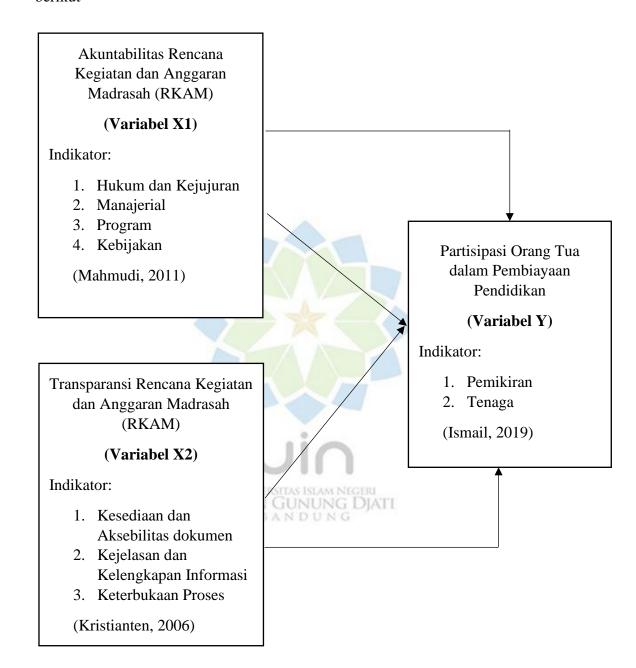
c. Bentuk Partisipasi

Partisipasi dibagi dalam beberapa bentuk dimana ada partisipasi vertikal dan ada partisipasi secara horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena menjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalan suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri (Depdiknas, 2010).

Partisiasi orang tua siswa disekolah sangatlah penting. Partsipasi orang tua siswa dipengaruhi oleh beberapa factor yang diantaranya Akuntabilitas maupun transparansi pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKAM). Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan suatu upaya untuk dilakukan dalam pengembangan sistem keuangan disekolah. Akuntabilitas pengelolaan RKAM dilakukan secara baik dan benarserta memberikan dampak yang baik terhadap transparansi begitupun terhadap partisipasi orang tua siswa. Pada akuntabilitas pengelolaan keuangan itu sangat penting patuh terhadap hukum yang dimana seseorang memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perundangundangan yang telah berlaku, penghindari korupsi, peran yang jelas, harapan dan kinerja yang jelas, pelaporan kribel, serta mempertanggung jawabkan dan mempertimbangkan dampak dimasa depan agara supaya tidak adaterjadi kesalah pahaman antara pihak sekolah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan RKAM dapat mempengaruhi partisipasi orang tua siswa. Akuntabilits yang telah patuh terhadap hukum dan dapat mempertanggung jawabkan, maka dapat meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan orang tua siswa. Mengacu pada penjelasan diatas, dapatdisimpulkan bahwa adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan RKAM akan menumbuhkan tingginya partisipasi orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan.

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrassah (RKAM) terhadap Partisipasi Orang Tua Murid dalam Pembiayaan Pendidikan

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hypotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

- H₀:Tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Sekabupaten Bandung
- 2. H₁: Terdapat pengaruh positif signifikan antara akuntabilitas Pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Sekabupaten Bandung.
- 3. H₂: Terdapat pengaruh positif signifikan antara transparansi pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Sekabupaten Bandung.
- 4. H₃: Terdapat pengaruh positif signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) terhadap partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Sekabupaten Bandung.

H. Penelitian Relevan/Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam program RKAS/ RKAM terhadap partisipasi orang tua siswa diantaranya adalah:

 Ristya Dwi Angraini melakukan penelitian tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggarn Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya, yang telah menemukan bahwa transparansi pengelolaan angaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabayasangat transparan. Hal tersebut dapart dilihat dari terbentuknya informasi mengenai penerimaan dana BOS dalam program RKAS. Dalam akuntabilitas anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam program RKAS dapat dilihat dengan laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana BOS berupa lampiran formulir yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara sekolah, dan ketua komite sekolah dan mengirim kepada UPTD dan Tim Bantuan Operasional Sekolah Pusat (Anggraini, 2013). Persamaan penelitian Ristya Dewi dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan sekolah dan membahas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya pada variabel y, tujuan, dan tempat penelitian.

- 2. Denny Boy dan Hotniar Siringoringo melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Angaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) terhadap Partisipasi Orang Tua Murid, telah ditemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan angaran pendapatan dan belanja sekolah mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan (Siringoringo, 2009). Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan sekolah dan membahas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya pada variabel y, tujuan, dan tempat penelitian.
- 3. Giyanto melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Belah 1 Kecamatan Donoarjo Kabupaten Pacitan, ditemukan bahwa (1) Penyusunan dan rancangan dana BOS dikelola dengan baik, (2) Pelaksanaan pengelolaan dana sudah transparan sesuai dengan tujuan, pembukuan sesuai ketentuan, namun perlu dibentuk tim kerja barang, pemajangan pengguna dana Bos selalu digunakan sebagai bentuk keterbukaan dan sosialisasi kepada komite atau masyarakat, (3) Monitoring tidak dilakukan oleh tim Manajemen BOS Kabupaten namun hanya dilakukan oleh pengawas TK dan SD Kecamatan, monitoring atau pengawasan juga dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sekali dalam setahun, (4) Evaluasi dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dilakukan setahun sekali bersamaan dengan Bimtek BOS,

- penyusunan RKAS ditahun berikutnya, (5) Pelaporan dilakukan secara interen dan eksterenmulai dari laporan triwulan, semester, dan tahunan masuk dalam kategori transparan sesuai dengan ketentuan, (6) Partisipasi masyarakat, melalui komite sekolah terhada perencanaan, penyaluran, dan penggunaan data sampai pelaporan sangat baik dan transparan (Giyanto, 2013). Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan sekolah dan membahas akuntabilitas. Perbedaannya pada variabel x2, y, tujuan, dan tempat penelitian.
- 4. Henry Haspan melakukan penelitian tentang *The Effect of Public Participation, Transparancy, Accountabillity on the Efficiency of The Distribution of the Scholl Operational Support Funds (BOS) in Tebing Tinggi City (Case Study of Taman Siswa College)* menemukan bahwa *This indicates that public participation in the efficiency of the distribution of School Operational Support Funds through the school committee is still not optimal* (Haspan, 2016). Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan sekolah dan membahas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya pada variabel y, tujuan, dan tempat penelitian.
- 5. Fierda Shafratunnisa melakukan penelitian tentang Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir, ditemukan bahwa penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir sudah cukup berjalan dengan baik, yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan, dan komite dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur SD Islam Binakheir (Shafratunnisa, 2015). Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan sekolah dan membahas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya pada variabel y, tujuan, dan tempat penelitian.

6. Uni Septiviastuti, skripsi yang berjudul Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupatan Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo. Hal ini didukung dengan hasil rekapitulasi jawaban responden yang menunjukkan mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 37 % dan didukung pula kondiri riil dilapangan dimana sudah terpasang papan proyek pembangunan, papan prasasti marmer, dan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kantor Desa. Hipotesis kedua partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Ponorogo. Hasil ini didukung dari rekapitulasi jawaban responden yang menunjukkan mayoritas responden setuju dengan frekuensi 45,2 % dan didukung pula kondisi rill dilapangan dimana pemerintah desa sudah menerapkan partisipasi masyarakat dengan terdapatnya website, media sosial, dan blog desa, serta terdapat keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan. Hipotesis ketiga akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Ponorogo. Hal ini didukung dari rekapitulasi jawaban responden yang menunjukkan hasil 55,6% menjawab setuju dan hal ini juga didukung kondisi rill di lapangan dimana pemerintah desa sudah melakukan pelaporan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hipotesis keempat memperoleh hasil bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan ADD di Kabupaten Ponorogo (Septiviastuti, 2018). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Uni Septiviastuti dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi dana desa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Uni Septiviastuti dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah pada variabel pengelolaan dana desa, metode penelitian dan objek tempat penelitian.

- 7. Yohanes, Jurnal yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Hasil penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,549, dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 0,443, sementara pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap partisipasi masyarakat di Desa Tulungrejo sebesar 89,8%. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tulungrejo (Yohanes, 2018). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes, dkk, dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi dana desa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes, dkk, dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada variabel tingkat kepercayaan masyarakat desa dan objek kajian penelitian.
- 8. Fadhli Wira Pratama dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS pada SDN di Kecamatan Tanjung Pinang Timur (Wira Pratama, 2013). Persamaan penelitian Fadhli dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan sekolah dan membahas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya pada variabel y, tujuan, dan tempat penelitian.
- 9. Raeni, dengan judul Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan terhadap Produktivitas SMK (Raeni, 2014). Persamaan penelitian Raeni dengan peneliti adalah samasama meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Perbedaannya pada variabel, tujuan, dan tempat penelitian.
- 10. Triyono, Jurnal yang berjudul, The Determinant Accountability of Village Funds Management (Studi in The Villages in Wonogiri District). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyajian laporan keuangan tidak

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Kualitas Pengawasan BPD tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 4) Kapasitas aparat desa tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 5) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. 6) Sistem Kontrol Intern Pemerintah (SPIP) berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Triyono, 2019). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Triyono, dkk dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi. Perbedaan penelitian yang dilakukan Triyono, dkk dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada metode penelitian dan objek penelitian yang akan dilakukan.

Tabel. 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Ristya Dwi Angraini, 2013. Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggarn Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya	 Fokus penelitian pada pengelolaan keuangan sekolah, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas Menggunakan pendekatan kuantitatif 	 Fokus penelitian berbeda Peneiliti berfokus pada Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dalam program RKAS
2.	Denny Boy dan Hotniar Siringoringo, 2009. Analisis Pengaruh	Fokus penelitian pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas	Tempat PenelitianFokus penelitian, peneliti lebih berfokus pada

	Akuntabilitas dan	• Menggunakan		RKAM daripada
	Transparansi	pendekatan		APBS
	Pengelolaan	kuantitatif		
	Angaran			
	Pendapatan Belanja			
	Sekolah (APBS)			
	terhadap Partisipasi			
	Orang Tua Murid.			
3.	Giyanto, 2013.	• Fokus penelitian	•	Tempat Penelitian
	Akuntabilitas	pada partisipasi,	•	Menggunakan
	Pengelolaan Dana	ak <mark>untabilit</mark> as		pendekatan
	Bantuan			kualitatif
	Operasional			
	sekolah (BOS) di			
	Sekolah Dasar			
	Negeri Belah 1			
	Kecamatan			
	Donoarjo	LIIO		
	Kabupaten Pacitan.	OILI		
4.	Henry Haspan,	Fokus penelitian	•	Tempat Penelitian
	2016. The Effect of	pada partisipasi,	•	Variabel terikat
	Public	transparansi dan		efisiensi distribusi
	Participation,	akuntabilitas		sekolah
	Transparancy,	 Menggunakan 		
	Accountabillity on	pendekatan		
	the Efficiency of	kuantitatif		
	The Distribution of			
	the Scholl			
	Operational			
	Support Funds			

	(BOS) in Tebing			
	Tinggi City (Case			
	Study of Taman			
	Siswa College)			
5.	Fierda	Fokus penelitian	•	Tempat Penelitian
	Shafratunnisa,	pada transparansi	•	Menggunakan
	2015. Penerapan	dan akuntabilitas		pendekatan
	Prinsip			kualitatif
	Transparansi dan			
	Akuntabilitas			
	dalam pengelolaan			
	Keuangan Kepada			
	Stakeholder di SD			
	Islam Binakheir			
6.	Uni Septiviastuti,	• Fokus penelitian	•	Tempat Penelitian
	2018. Pengaruh	p <mark>ada transp</mark> aransi	•	Menggunakan tiga
	Transparansi,	dan akuntabilitas		variabel bebas
	Partisipasi	 Menggunakan 	•	Pengelolaan dana
	Masyarakat dan	pendekatan		desa sebagai
	Akuntabilitas	kuantitatif		variabel bebas
	Terhadap	BANDUNG		
	Pengelolaan Dana			
	Desa di Kabupatan			
	Ponorogo.			
7.	Yohanes, 2018.	Fokus penelitian	•	Tepat penelitian
	Pengaruh	pada partisipasi,		penelitian
	Akuntabilitas dan	transparansi dan	•	Lebih berfokus
	Transparansi	akuntabilitas		pada ADD
	Pengelolaan			(Alokasi Dana
	Alokasi Dana Desa			Desa)

	(ADD) Terhadap	 Menggunakan 	
	Partisipasi	pendekatan	
	Masyarakat Desa.	kuantitatif	
8.	Fadhli Wira	Fokus penelitian	Tempat Penelitian
	Pratama, 2013.	pada pengelolaan	Menggunakan tiga
	Pengaruh	keuangan sekolah,	variabel bebas
	Partisipasi	partisipasi,	Variabel terikat
	Masyarakat,	transparansi dan	efisiensi
	Transparansi dan	akuntabilitas	penyaluran dana
	Akuntabilitas	 Menggunakan 	BOS
	Publik Terhadap	pendekatan	
	Efisiensi	kuantitatif	
	Penyaluran Dana		
	BOS pada SDN di		
	Kecamatan		
	Tanjung Pinang		
	Timur	LIIO	
9.	Raeni, 2014.	Fokus penelitian	Tempat Penelitian
	Pengaruh Prinsip	pada transparansi	 Menggunakan
	Keadilan, Efisiensi,	dan akuntabilitas	empat variabel
	Transparansi, dan	 Menggunakan 	bebas
	Akuntabilitas	pendekatan	Variabel terikat
	Pengelolaan	kuantitatif	produktivitas
	Keuangan terhadap		SMK
	Produktivitas SMK		
10.	Triyono, 2019. The	Fokus penelitian	Tempat penelitian
	Determinant	pada akuntabilitas	Menggunakan satu
	Accountability of		variabel bebas dan
	Village Funds		
<u> </u>	I		ı

Management (Studi	 Menggunakan 	satu variabel
in The Villages in	pendekatan	terikat
Wonogiri District).	kuantitatif	

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu dari variabel partisipasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Mengenai perbedaanya terletak dari objek penelitian kajian. Dari beberapa penelitian diatas, yang dijadikan sebagian objek penelitannya adalah desa sedangkan objek penelitian yang akan peneliti gunakan adalah sekolah/madrasah.

Fokus peneliti adalah pada akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah dalam pengelolaan RKAM (X1), mencakup suatu pertanggung jawaban dalam mengelola dan mengendalikan keuangan yang telah dipercayakan kepada madrasah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Transparansi pengelolaan keuangan madrasah dalam pengelolaan RKAM (X2), merupakan suatu yang nyata, jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan didalam pengelolaan keuangan tersebut. Serta partisipasi orang tua siswa (Y), yang merupakan suatu bentuk pemikiran dan tenaga yang dimana orang tua siswa dapat menyampaikan aspirasi pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan di madrasah, dan sukarela memberikan dukungan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan di madrasah.

